

PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET DENGAN VARIABEL KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA¹

EFFECT OF QUALITY REGIONAL APPARATUS ON ASSET MANAGEMENT WITH LEADERS' COMMITMENT AS MODERATION VARIABLE IN THE GOVERNMENT OF LANGSA CITY

Iqlima Azhar², Agustina Nurul Fajriah³, Dhamayanti⁴
Email: iqlima_a@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of the quality of human resources on asset management with leadership commitment as a moderating variable (Study on SKPK Langsa City). The research population is the managers of regional property, with as many as 60 respondents. The sampling technique used a saturated sample by distributing questionnaires to over 60 respondents. The results showed that the Leadership Commitment variable positively and significantly influenced asset management in the Langsa City Government. Leadership commitment can also moderate the influence of the quality of the regional apparatus on asset management in a positive and significant way.

Keywords: Asset Management, Leadership Commitment, Quality of Regional Apparatus.

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah menguji hubungan kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset dengan komitmen pimpinan sebagai variabel pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Kota Langsa). Populasi penelitian adalah para pengelola barang milik daerah sebanyak 60 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 60 responden. Hasil riset menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Langsa. Komitmen Pimpinan juga dapat memoderasi hubungan kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset secara positif dan signifikan.

Kata Kunci: Manajemen Aset, Komitmen Pimpinan, Kualitas Aparatur Daerah.

A. PENDAHULUAN

Manajemen aset atau biasa disebut pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Barang Milik Kota, adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang milik kota yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan

¹ Diterima 25 Agustus 2022, Direvisi 07 September 2022

² Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416

³ Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416

⁴ Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416

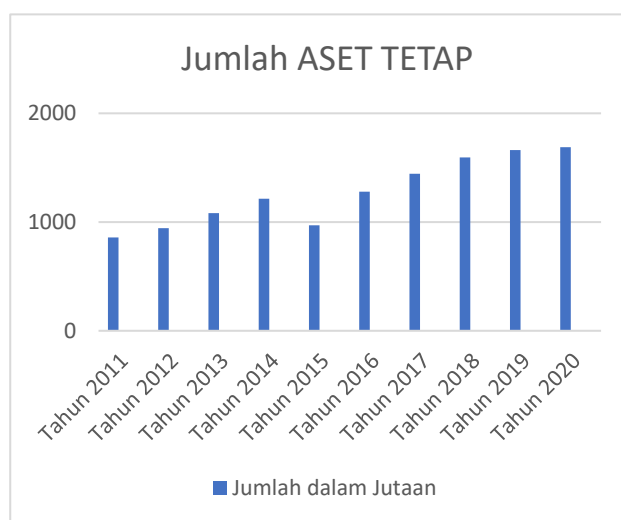
harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan juga penatausahaannya. Di dalam Pasal 2 dan 3 Qanun No. 6 Tahun 2013 tersebut disebutkan maksud dan tujuan pengelolaan barang milik kota yaitu; “1) mengamankan barang milik kota, 2) menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik kota, 3) memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik kota, 4) Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota, dan 5) terwujudnya pengelolaan barang milik Kota yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel”. Berdasarkan pernyataan tersebut, manajemen aset menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk didiskusikan. Pemerintahan dituntut untuk dapat bekerja dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengelolaan aset yang baik, karena dengan pengelolaan aset yang baik merupakan suatu upaya guna menciptakan good governance.

Kota Langsa adalah salah satu Kota dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2001 lalu, sejak pemekaran tersebut proses penyerahan aset Kabupaten Aceh Timur terhadap Kota Langsa sudah pada tahap ke empat. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah serahkan Rp 232 Miliar aset kepada Pemerintah Kota Langsa. Pada saat menyaksikan penandatanganan penyerahan aset yang dipusatkan di Aula Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengatakan bahwa; “Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, proses penyerahan aset suatu daerah harus segera dituntaskan dalam waktu setahun sejak daerah tersebut dimekarkan”. (<https://acehprov.go.id/berita/kategori/>

[pemerintahan/gubernur-saksikan-penyserahan-aset-aceh-timur-pemko-langsa](https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/gubernur-saksikan-penyserahan-aset-aceh-timur-pemko-langsa)).

Ruang lingkup aset atau barang milik daerah dalam penelitian ini adalah aset tetap. Berdasarkan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri dalam PSAP No. 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah aau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan klasifikasi aset tetap yang disebutkan dalam PSAP 07 adalah bahwa yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah hak atas tanah.

Grafik 1
Jumlah Aset Tetap



Dilihat dari grafik diatas berdasarkan Laporan keuangan pemerintah Kota Langsa dari tahun 2011, aset tetap yang dimiliki pemerintah kota Langsa mengalami peningkatan dari tahun ketahun nya, terkecuali pada tahun 2015. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Langsa tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Langsa menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan. Pemerintah Kota Langsa tidak menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan kemungkinan yang menyebabkan turunnya nilai aset tetap pada tahun 2015 sesuai yang terlihat pada grafik di atas.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan Paranga, 2020, menyatakan bahwa "manajemen aset dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan komitmen pimpinan secara positif dan signifikan, hal tersebut mencerminkan bahwa jika sumber daya manusia dan komitmen pimpinan semakin kuat, maka manajemen aset juga semakin dapat dipercaya". Jefry Eka Prayogi, dkk (2021) juga dalam penelitiannya menyebutkan bahwa "kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen aset". Azhar (2017)

menyebutkan bahwa "kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh". Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 pasal 44 menyebutkan bahwa "Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya". Maka dari itu, disimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah mempunyai kedudukan yang potensial dalam manajemen aset.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian dengan tema "**Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah Terhadap Manajemen Aset dengan Komitmen Pimpinan sebagai variabel Moderasi pada Pemerintah Kota Langsa**".

B. STUDI PUSTAKA

1) *Stewardship Theory*

Donaldson & Davis (1991), memperkenalkan teori *stewardship* sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. *Stewardship theory* merupakan "suatu teori yang memberi gambaran suatu kondisi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi difokuskan pada target utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi", sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif yaitu sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (masyarakat), kemudian perilaku *steward* yang tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* akan berusaha mencapai tujuan organisasinya. Teori ini didesain bagi peneliti untuk menguji kondisi dimana para eksekutif/*steward*, dalam penelitian ini yaitu aparatur daerah, dimana berperan sebagai pelayan untuk dapat termotivasi untuk berbuat dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan

pemerintah untuk terciptanya tata kelola pemerintah (*good governance*) yang baik. *Stewardship theory* lebih fokus kepada *output* yang ingin dicapai tanpa mementingkan diri sendiri, melainkan demi kepentingan publik.

Zoelisty (2014) menyatakan bahwa fungsi *stewardship theory* disini adalah “untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat seperti mengimplimentasikan akuntabilitas pada kinerjanya”. Harapannya teori ini dapat menjadi landasan agar pemerintah bekerja demi rakyat dan selalu focus pada pencapaian kinerja yang optimal dan bermanfaat bukan hanya bagi individu tetapi untuk masyarakat luas sehingga dapat menjadi landasan pemikiran agar tata kelola pemerintahan kita terhindar dari tindakan oportunistik.

2) Manajemen Aset

Menurut ensiklopedia administrasi Indonesia, dalam LAN (2007:3) “manajemen Aset adalah seluruh kekuatan untuk menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja untuk mencapai tujuan tertentu”. Setiap daerah memiliki barang atau aset yang biasa disebut barang milik daerah. Pasal 1 ayat 10 dan 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD/N atau berasal dari perolehan lain yang sah. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa “Barang Milik Daerah (BMD) sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, mendefinisikan aset sebagai “sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Barang milik daerah ini memerlukan pengelolaan dengan tujuan dapat menunjang kinerja pemerintahan daerah dalam pengoptimalisasi pemanfaatan aset di daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. “Manajemen aset merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang kota yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya” (Qanun No 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik Kota).

3) Kualitas Aparatur Daerah

Philip B Crosby (1984) menyatakan bahwa “kualitas adalah konsistensi dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan”. Kasmir (2004) menyebutkan “kualitas pelayanan sebagai suatu kemampuan dari perusahaan dalam

hal memberi pelayanan yang pengalokasiannya berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya”.

Ruky (2003) menyebutkan “Kualitas Aparatur daerah sebagai level kemampuan yang dapat ditunjukkan oleh para pegawai dalam melaksanakan aktifitas yang menjadi tanggung jawab pegawai untuk mencapai tujuan organisasi”. Kualitas aparatur daerah adalah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan (Suhesti, 2019).

Menurut Simamora dan Halim, (2012) “Aparatur pemerintah sudah seharusnya mempunyai kualitas yang kompeten dan profesional karena kualitas aparatur yang rendah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan aset daerah”. Aparatur yang tidak memiliki pemahaman yang memadai akan bekerja tersendat-sendat dan berdampak pada pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Aparatur yang tidak cakap tentu tidak dapat melaksanakan suatu kegiatan spesifik dengan baik seperti mengoperasikan teknologi informasi, berkomunikasi yang efektif atau mengimplementasikan suatu strategi. Rendahnya tingkat pemahaman aparatur terhadap tupoksinya merupakan kendala dalam pemanfaatan sistem informasi dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, dimana salah satunya adalah pengelolaan barang milik daerah. Hertati (2015) menegaskan “pentingnya peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki posisi bagi keberlangsungan organisasi tersebut, betapapun lengkap dan canggihnya peralatan kerja yang dimiliki oleh suatu lembaga jika tanpa kekuatan manusia,

tidak akan berfungsi untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai”.

Menurut Astini (2018) “Pemerintah hendaknya menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang dapat mendorong perilaku yang positif dan manajemen yang sehat dalam manajemen aset, yaitu melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh aparatur, adanya komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya kepemimpinan yang kondusif, terstruktur organisasi yang mendukung strategi dalam pencapaian tujuan organisasi, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia yang efektif dan juga hubungan kerjasama yang baik antar instansi”.

4) Komitmen Pimpinan

Strees dan Porter (2006) mengatakan “komitmen sebagai suatu kondisi dimana seseorang menjadi terkait oleh prilakunya sehingga muncul keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya”. Dengan kata lain komitmen adalah bentuk kontribusi yang mengikat kepada orang lain dalam hal tertentu, atau tindakan tertentu. Robbins (2007), mendeskripsikan “komitmen sebagai suatu kondisi di mana individu memihak organisasi dan tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi”. Definisi komitmen menurut Rivai (2008) yaitu “penetapan dalam diri seseorang untuk menerima atau menolak satu maksud atau lebih yang menuntun perbuatan atau kegiatannya”.

Kartono (2010) mengatakan “pimpinan sebagai seorang pribadi yang memiliki kemampuan dan kelebihan, khususnya kemampuan dan kelebihan di suatu bidang sehingga ia mampu

mengendalikan orang lain untuk melakukan aktivitas tertentu bersama-sama demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan”.

Komitmen Pimpinan adalah mempertahankan keikutsertaan pimpinan puncak dalam organisasi yang ditujukan (Supriadi, 2010). Definisi Komitmen Pimpinan yaitu “perilaku mengendalikan dan mengarahkan orang lain dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama” (Timpe, 2002). Dikaitkan dengan pendapat Choi & Behling (1997), terkait komitmen pimpinan puncak, bahwa tanggung jawab TQM (Total Quality Management) dalam suatu organisasi bergantung pada banyak pihak. Pimpinan puncak tidaklah bekerja sendiri, tetapi berkerjasama dengan orang lain atau karyawannya. Kerja sama harus dilakukan melalui keterlibatan pimpinan puncak dalam melakukan tugas pokoknya, dengan mengarahkan, mempengaruhi, mendorong bawahan kearah berbagai macam tujuan dalam organisasi. Pentingnya peran pemimpin dalam suatu instansi juga sejalan dengan penelitian Simamora & Halim (2012) yang menyebutkan bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran yaitu sumber daya manusia, bukti kepemilikan aset, penilaian aset, dan komitmen pimpinan”.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat kota (SKPK) di Kota Langsa.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, menurut Sugiyono (2018) “untuk memperoleh data kuantitatif tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan

kuesioner kepada responden untuk dapat dilakukan penilaian atau skor pada masing-masing jawaban responden”.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu “data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan” (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data primer diambil dari pengumpulan data kuesioner yang diberikan kepada pegawai pada Dinas-Dinas di SKPK Kota Langsa.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPK pada Pemerintah Kota Langsa sebanyak 30 SKPK, dan Sampel yang digunakan adalah menggunakan sampel jenuh yang mana semua populasi dijadikan sampel. Yang menjadi responden dari setiap SKPK adalah Kasubbag umum sebagai penanggungjawab kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di dalam satuan kerja perangkat daerah, dan Pegawai pada bagian pengurus barang selaku yang bertanggung jawab atas barang/aset yang terdapat dalam satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 1
Daftar SKPK Kota Langsa

| No | Nama SKPK |
|----|--|
| 1 | Sekretariat Daerah Kota Langsa |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 6 | Inspektorat Kota Langsa |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 8 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 9 | Dinas Kesehatan |

| | |
|----|--|
| 10 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 12 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 13 | Badan perencanaan Pembangunan Daerah |
| 14 | Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan |
| 15 | Dinas Perhubungan |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 19 | Sekretariat DPRK Kota Langsa |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa |
| 21 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 22 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 24 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 26 | Dinas Sosial |
| 27 | Sekretariat Baitul Mal |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 29 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 30 | Sekretariat Komisi Independen Pemilihan |

Sumber: BPS (2021)

Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS (Statistical Package for Social Science). Pengujian hipotesis menggunakan Model Regresi *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk memperoleh gambaran mengenai Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Manajemen Aset dengan Komitmen Pimpinan sebagai variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kota Langsa). Spesifikasi persamaan

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2M + e \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2M + b_3X_1.M + e \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

Y : Manajemen Aset

a : Konstanta

X1 : Kualitas Aparatur Daerah

M : Komitmen Pimpinan

e : error

b : Koefisien Regresi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Berikut ini persamaan dari pengujian hipotesis, yaitu:

$$Y = 15.228 + 0,301 X_1 + 0,134 M \dots\dots (1)$$

Berdasarkan regresi linier berganda, maka dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 15.228 yaitu nilai kualitas aparatur daerah bernilai nol, maka manajemen aset bernilai sebesar 15.228.
2. Koefisien Regresi Variabel kualitas aparatur daerah sebesar 0,301 artinya setiap adanya peningkatan kualitas aparatur daerah sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan manajemen aset sebesar 0,301.
3. Variabel Komitmen pimpinan bernilai positif terhadap manajemen aset dengan nilai koefisien 0,134 yaitu setiap penambahan variabel komitmen pimpinan sebesar satu satuan, maka manajemen aset juga akan meningkat sebesar 0,134.

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Dependent Variabel; Manajemen aset

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linear beganda sebagai berikut:

$$Y = 244,556 - 7,904 X1 - 5.911 M + 0.216 X1.M..... (2)$$

Persamaan regresi linear berganda diatas menerangkan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 244,556 yaitu jika nilai variabel kualitas aparatur daerah dan sistem pengendalian internal dengan variabel moderasi komitmen pimpinan bernilai nol, maka manajemen aset daerah sebesar 244,556.
- b. Variabel kualitas aparatur daerah dengan variabel moderasi komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap manajemen aset daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,216. Artinya setiap penambahan variabel kualitas aparatur daerah dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi sebesar satu satuan, maka manajemen aset akan naik sebesar 0,216.

| Model | | Unstandardized Coefficients | | T | Sig. |
|-------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | | |
| 1 | (Constant) | 15.228 | 8.162 | 1.866 | ,067 |
| | Kualitas Aparatur Daerah | 0,301 | 0,191 | 1,571 | ,122 |
| | Komitmen Pimpinan | 0,134 | 0,136 | .989 | ,327 |

Pembuktian Hipotesis

- a. Variabel kualitas aparatur daerah mempunyai nilai sig.t sebesar 0,048, karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset sehingga

hipotesis ke-1 diterima dan terbukti kebenarannya.

| Model | | Unstandardized Coefficients | | T | Sig. |
|-------|--|-----------------------------|------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | | |
| 1 | (Constant) | 244.556 | 197.724 | 1.237 | ,221 |
| | Kualitas Aparatur Daerah | -7.904 | 5,521 | 1,432 | ,048 |
| | Komitmen Pimpinan | -5.911 | 5.181 | 1.141 | ,009 |
| | Kualitas Aparatur Daerah* Komitmen Pimpinan | .216 | .145 | 1.489 | .042 |

- b. Variabel komitmen pimpinan memiliki sig.t sebesar 0,009. karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa komitmen pimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen aset sehingga hipotesis ke-2 diterima dan terbukti kebenarannya.
- c. Variabel kualitas aparatur daerah dengan komitmen pimpinan sebagai pemoderasi memiliki nilai sig.t sebesar 0,042. Karena nilai sig.t > α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa komitmen pimpinan memoderasi kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset karena berpengaruh positif signifikan sehingga hipotesis ke-3 diterima dan terbukti kebenarannya.

E. PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap manajemen aset

Penelitian ini menyatakan bahwasanya variabel kualitas aparatur daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset. Hal ini berarti menyimpulkan bahwa semakin tinggi keahlian dan pengalaman yang dimiliki aparatur sebagai Pengurus BMD maka pengelolaan pada unit kerja juga semakin terkoordinasi dengan baik. Hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa hal yang

membuat kualitas aparatur daerah dapat mempengaruhi manajemen aset di SKPK Kota Langsa, salah satunya adalah sering mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis serta dengan pendidikan yang mencukupi dalam pengelolaan BMD dan juga Penelitian ini berhasil membuktikan dengan adanya keahlian yang relevan tentang pengelolaan barang milik daerah maka akan meningkatkan kualitas aparatur sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Kemampuan instansi dalam mencapai tujuan di tentukan oleh kualitas apratur/sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi tersebut. Oleh sebab itu, aparatur daerah merupakan salah satu elemen yang penting dalam organisasi yaitu dengan meningkatnya pemahaman aparatur daerah, berperan penting dalam pengelolaan barang milik daerah pada satuan kerja perangkat Kota Langsa yaitu aset daerah yang wajib dikelola dan penatausahaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak bagi setiap ASN, minimal 20 jam pelajaran per tahun. ASN harus terus dikembangkan secara terarah dan sistematis, agar menjadi ASN yang compete di bidangnya.

Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahmadhani (2022), Astini (2018), dan Azhar (2017) dimana mereka menyatakan bahwasanya kualitas aparatur daerah mempengaruhi manajemen aset. Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas aparatur daerah memegang kendali yang cukup besar dalam pengelolaan aset daerah agar terciptanya akuntabilitas dalam penatausahaan aset di setiap daerah.

Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah

Variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen aset. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Komitmen pimpinan memiliki pengaruh terhadap manajemen aset di SKPK Kota Langsa. Hal ini berarti pimpinan harus terus berkomitmen melakukan monitoring atas pelaksanaan manajemen aset, serta dengan motivasi yang diberikan pimpinan, pengurus barang bekerja sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Pimpinan SKPK wajib menyediakan persyaratan yang memadai mengenai pendidikan dan pengalaman dalam mengisi jabatan sebagai pengurus/penyimpan barang di lingkungan SKPK dan pimpinan SKPK wajib memfasilitasi pengurus/penyimpan barang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan agar dapat mengelola barang milik daerah dengan baik.

Sesuai dengan teori *stewardship* yang memiliki pandangan tentang tata cara mengelola suatu organisasi dan personel-personel yang terkait di dalamnya. Teori *stewardship* mengembangkan konsep kebersamaan, kemitraan, pemberdayaan, saling percaya, dan pelayanan yang membentuk sikap yang dapat mengatasi isu-isu terkait in-efisiensi kinerja dalam suatu organisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar (2013) bahwa komitmen pimpinan mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah karena komitmen pimpinan mampu memberikan sumbangan maksimal untuk mengelola aset daerah seperti yang diharapkan.

Menurut Fitriani (2017), komitmen pimpinan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan baik jika memiliki pedoman dan sistem yang kuat untuk memastikan visi, misi, tujuan,

sasaran, program serta kegiatan dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik. Sutrisno (2009) menyebutkan “salah satu tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin adalah bagaimana ia dapat menggerakkan para bawahannya agar senantiasa mau dan bersedia mengerahkan kemampuannya yang terbaik untuk kepentingan kelompok atau organisasinya’. Kepemimpinan memiliki peran yang dominan dan krusial dalam keseluruhan dari upaya guna meningkatkan motivasi para pekerja, baik di tingkat individual, kelompok, maupun organisasi. Sutrisno (2009) juga menyebutkan bahwa faktor kepemimpinan memegang peran yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan hal tersebut tentu tidaklah mudah mengingat perilaku bawahan yang berbeda-beda.

Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Komitmen Pimpinan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini menyatakan bahwa variabel kualitas aparatur daerah dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen aset.

Berdasarkan hasil penelitian ini Komitmen pimpinan dapat memoderasi Kualitas Aparatur daerah terhadap manajemen aset. Dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen aset, disamping kualitas aparatur yang memadai dalam mengelola aset daerah, juga diperlukan komitmen pimpinan yang terus mendukung pengurus barang untuk bekerja sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Pimpinan SKPD wajib memenuhi kriteria yang memadai mengenai pendidikan dan pengalaman

dalam mengisi jabatan pengurus/penyimpan barang di lingkungan SKPD dan pimpinan SKPD juga wajib memfasilitasi pengurus/penyimpan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan. penelitian ini juga membuktikan bahwa apabila apratur pemerintah mempunyai keahlian yang relavan serta dengan pelatihan yang diterapkan oleh pemerintah setempat dalam manajemen aset memadai, maka aparatur pemerintah di SKPK Kota Langsa akan melaksanakan tugas dengan baik, dalam hal. (PP No. 60 Tahun 2008) menyatakan bahwasanya pemerintah harus melakukan penelusuran latar belakang pegawai dalam proses penempatan sesuai dengan bidangnya dan melakukan pelatihan serta pembinaan demi meningkatkan keahlian para pegawainya, pemerintah daerah harus menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan latar belakang pendidikannya, demi meningkatkan manajemen aset yang efisien. Maka dari itu komitmen pimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas aparatur yang akan mengelola barang milik daerah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Diwanti (2016) yang menyatakan bahwa Komitmen Pimpinan memoderasi hubungan antara kualitas aparatur daerah dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah pada SKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan Fitriani (2017), komitmen terhadap kompetensi dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah. Hal tersebut memungkinkan organisasi untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendorong adanya standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintahan.

Organisasi atau lembaga menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi para pegawai.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, komitmen pimpinan dapat memberikan wujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Disamping itu juga, komitmen pimpinan yang tinggi menjunjung integritas memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin akuntabel laporan keuangan yang dihasilkan suatu daerah, maka manajemen aset nya juga tertata dengan baik. Hal ini mendukung pendapat COSO (2009), yaitu jika kinerja pimpinan organisasi baik, maka seluruh komponen akan menyatu dan saling menjalin di dalam proses manajemen. COSO mengakui suatu *"tone on the top"*, oleh karenanya pemimpin organisasi ditekankan untuk mengambil peranan yang sangat penting dalam memimpin organisasi demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Fitriani (2007) "tanpa adanya komitmen, maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungan dengan bakat, kepintaran, atau talenta. Komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan guna melaksanakan tugas".

F. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Research ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset dengan komitmen pimpinan sebagai variabel pemoderasi. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa:

- Kualitas aparatur daerah mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap manajemen aset.
- komitmen pimpinan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap manajemen aset.
- komitmen pimpinan juga dapat memoderasi variabel kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas dalam ruang lingkup penelitian dimana hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Langsa, sementara setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Aceh Timur, terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu aceh tamiang, kota langsa, dan aceh timur.

Saran dan Rekomendasi

Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperluas ruang lingkup penelitian ke 2 wilayah hasil pemekaran Aceh Timur yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur, lalu menganalisis pelaksanaan manajemen aset setelah terjadinya pemekaran pada ketiga wilayah tersebut. Penelitian yang lebih mendalam dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat diketahui permasalahan dari akarnya, apa yang menyebabkan penetapan kepemilikan aset-aset daerah hasil pemekaran begitu sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan segketa aset tersebut.

REFERENSI

- A. Dale Timpe. 2002. **Memotivasi Pegawai**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Achmad, S. Ruky, 2003. **Kualitas Sumber Daya Manusia**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Astini, Yuli. 2018. **Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Efektifitas Manajemen Aset Tetap**.

- Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis**, Vo. 13, No. 2, Hal. 173-184.
- Azhar, Iqlima. 2017. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. **Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi**. Vol. 1, No. 1.
- Choi, T.Y. & Behling O.C. 1997. **Top Managers and TQM Succes: One more Look After All These Years**, Academy of Management Executive. Vol. 2, No. 1, Page 37=47.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2009. Gudance on Monitoring Internal Control.
- Crosby, Philip. 1984. **Quality Without Tears the Art of Hassle Free Management**. New York: Mc. Graw Hill Inc.
- Diwanti, Dyah Pikanthi, dkk. 2016. Pengaruh Perilaku Kepemimpinan terhadap Komitmen anggota pada BUana Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kendal. **Valid Jurnal Ilmiah**. Vol. 17, No. 2, Hal. 80-86.
- Donaldson, L and J.H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder. *Returns Australian Journal of Management*. 16 (1): 49-64.
- Hertati, L. 2015. Competence of Human Resource, The Benefit of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. **Research Journal of Finance Accounting**, Vo. 6, No. 8, Hal. 12-19
- <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/gubernur-saksikan-penyerahan-aset-aceh-timur-pemko-langsa> (diakses 21 Juni 2022)
- Jefry Eka Prayogi, Iqlima Azhar, Muhammad Rizki Zati, 2021. Pengaruh pemahaman regulasi, system informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap manajemen aset pada SKPK Kota Langsa. **Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)**, Vol. 2, NO. 6, Hal. 350-361.
- Fitriani, Asri. 2017. Pengaruh KOMitmen Pimpinan dan Ligkungan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. **Jurnal Katalogis**, Vol. 5, No. 4, Hal. 113-122.
- Juliessi Paranga, 2020. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua. **Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah**, Vo. 5, No. 1, Hal. 54-79.
- Kartono Kartini Dr. 2010. **Pemimpin dan Kepemimpinan**. Jakarta: PT. Taja Grafindo Perkasa.
- Kashmir, 2004. **Manajemen Perbankan**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- LAN. 2007. Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, **Modul I: Dasar-dasar Manejemen Aset/Barang Milik Daerah**.
- Nazir, Moh. 2013. **Metode Penelitian**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Rahmadhani, Fitrah & Ria Ariani. 2022. Kualitas Aparatur, SIMDA-BMD, Regulas, dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan BMD. **Jurnal**

- Ekonomika dan Bisnis**. Vo. 2. No. 1, Hal. 275-290.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004, **tentang Perbendaharaan Negara**.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014, **tentang ASN**.
- Republik Indonesia, Qanun Kota Langsa No. 6 Tahun 2013, **tentang Pengelolaan Barang Milik Kota**.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 **tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 **tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- Republik Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 **tentang Akuntansi Ase Tetap**.
- Simamora, R., & Halim, A. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kab. Tapanuli Selatan. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis**, Vo. 10, No. 01, Hal. 47-61.
- Suhesti, Ningsih. 2019. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). **Jurnal Akuntansi Syariah**. Vo. 2, No.2.
- Sugiyono. 2018. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta. CV.
- Sutrisno, Edy. 2009. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Edisi Pertama, Cetakan 10. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Veithzal, Rivai. 2008. **Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan**. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Zoelisty, Capridiea. Adityawarman. 2014. Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro). **Jurnal Akuntansi Diponegoro**, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, Halaman 1-12. Semarang.